



Perkembangan Pendidikan Agama Islam Pada Masa Orde Lama

Siti Chomsiyah¹ Afifah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Sitichomsiyah02@gmail.com¹, Afifahsyahira48@gmail.com²

Abstract

Islamic education during the Old Order (1945–1966) faced various challenges, both in terms of government policies, socio-political conditions, and limited educational facilities. Nevertheless, this period served as a crucial starting point for establishing a strong foundation for the development of Islamic education in Indonesia. This study aims to understand the development of Islamic education during the Old Order era and to understand the role of Islamic figures and educational institutions in maintaining the existence of religious education amidst the dynamics of national politics. This study uses a qualitative method with a historical library research approach, through a review of various literature, archives, and regulations related to Islamic education policies during that period. The results show that the establishment of the Ministry of Religious Affairs on January 3, 1946, was a significant initial step because it was the first time that religious education was officially regulated by the state. Meanwhile, Islamic boarding schools (pesantren) and madrasahs (Islamic boarding schools) continued to play an active role as centers of Islamic education, instilling moral, religious, and national values. Figures such as KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zainal Mustafa, and H.M. Rasjidi made significant contributions in championing the recognition of Islamic education within the national education system. Thus, the Old Order era provided a solid foundation for the birth of the Islamic education system in Indonesia and became an important foothold for the development of Islamic education in subsequent periods.

Keywords: Islamic education, old order, Islamic boarding schools, Ministry of Religion.

Abstrak

Pendidikan Islam pada masa Orde Lama (1945–1966) mengalami berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik, maupun keterbatasan sarana pendidikan. Meskipun demikian, periode ini menjadi titik awal yang penting bagi terbentuknya fondasi kuat bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, serta memahami peran tokoh-tokoh Islam dan lembaga pendidikan dalam mempertahankan eksistensi pendidikan agama di tengah dinamika politik nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersifat historis, melalui penelusuran berbagai literatur, arsip, dan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam pada masa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 menjadi langkah awal yang signifikan karena untuk pertama kalinya urusan pendidikan agama diatur secara resmi oleh negara. Di sisi lain, pesantren dan madrasah tetap berperan aktif sebagai pusat pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kebangsaan. Tokoh-tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zainal Mustafa, dan H.M. Rasjidi memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan pengakuan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, masa Orde Lama memberikan dasar yang kokoh bagi lahirnya sistem pendidikan Islam di Indonesia dan menjadi pijakan penting bagi perkembangan pendidikan Islam pada periode-periode berikutnya.

Kata kunci: Pendidikan Islam, orde lama, pesantren, kementerian agama.

Pendahuluan

Pendidikan Islam sejatinya telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW.¹ Pada periode awal tersebut, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di masjid dan beberapa tempat tertentu, dengan fokus utama pada pengajaran Al-Qur'an serta penanaman nilai-nilai keislaman. Namun, pada masa itu pendidikan Islam belum memiliki bentuk formal yang diatur oleh negara karena belum terbentuk sistem pemerintahan yang mengelolanya.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah mulai berupaya menyatukan berbagai sistem pendidikan yang berkembang di masyarakat, termasuk pendidikan umum dan pendidikan Islam. Langkah penting dalam upaya tersebut adalah pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur seluruh urusan keagamaan, termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 20, yang menjadi dasar hukum pertama bagi pengakuan resmi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.² Sebelum undang-undang tersebut diterbitkan, kegiatan pendidikan Islam memang sudah berlangsung, tetapi masih terbatas dan berdiri secara mandiri antara sekolah umum, madrasah, dan pesantren.

Penting pula dipahami bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial politik yang mengiringi perjalanan bangsa. Setiap fase perkembangan negara selalu memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam yang terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Pada masa Orde Lama, misalnya, berbagai kebijakan pemerintah mulai diarahkan untuk memberikan ruang bagi pendidikan Islam agar dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, meskipun prosesnya berlangsung bertahap dan menghadapi banyak keterbatasan. Dalam konteks tersebut, penting pula dipahami bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pembentukan akidah dan moral, tetapi juga oleh dinamika sosial politik yang berkembang setelah Indonesia merdeka.³ Setiap kebijakan negara yang lahir pada periode ini memberikan arah baru bagi penyelenggaraan pendidikan Islam, sehingga lembaga-lembaga pendidikan agama mulai menata diri agar dapat beradaptasi dengan tuntutan sistem pendidikan nasional yang sedang dibangun. Proses penyesuaian inilah yang kemudian menjadi landasan bagi berbagai kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama, yang secara bertahap mulai memberikan ruang bagi pendidikan Islam untuk masuk dalam kerangka pendidikan formal di Indonesia.

Pendidikan Islam merupakan fondasi utama bagi umat Muslim dalam membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Melalui pendalaman ajaran Islam, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan akidah, membangun moral, serta membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam sejarah Indonesia, ajaran Islam memiliki kontribusi besar dalam membentuk nilai-nilai religius

¹ St Hasniyati and others, 'KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM St. Hasniyati Gani Ali', 8.2 (2015), 99–110.

² Kalpi Ningsih Heni, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama 1945-1965', *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1.1 (2015), 11

³ Ade Suhendra Darul 'ilmi, *Posisi Madrasah Dan Pesantren Dalam Politik Pendidikan di Indonesia* 08.01 (2020), 81.

dan moral masyarakat.⁴ Peran penting ini tidak terlepas dari perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang turut berkontribusi dalam perumusan dasar negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia, yang pada awalnya hanya diselenggarakan melalui lembaga-lembaga tertentu seperti pesantren, hingga akhirnya mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem pendidikan nasional melalui kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga difokuskan pada pembahasan mengenai landasan hukum dan kebijakan negara yang mendukung perkembangan pendidikan Islam, serta berbagai tantangan yang muncul selama masa orde lama. Meskipun perkembangan pendidikan selepas Indonesia merdeka memberikan gambaran yang tidak mudah.⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan Islam bisa berkembang sampai saat ini.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau studi pustaka, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pemilihan metode ini sejalan dengan pembahasan dalam jurnal yang dikaji, yang juga menggunakan pendekatan kualitatif historis melalui penelusuran literatur, arsip, dan kebijakan pendidikan Islam pada periode tersebut. Library research dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga memahami secara mendalam konsep, pemikiran, serta dinamika perkembangan pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang para ahli dan sejarawan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana proses terbentuknya kebijakan pendidikan Islam, seperti berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946, serta peran pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, metode studi pustaka memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji berbagai sumber baik klasik maupun kontemporer secara komprehensif. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi nilai-nilai, metode pembelajaran, serta pengaruh pendidikan Islam pada masa Orde Lama terhadap perkembangan pendidikan di masa selanjutnya. Karena penelitian ini berbasis teks dan bersifat konseptual-analitis, maka tidak memerlukan observasi lapangan maupun wawancara langsung. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada kajian historis dan teoritis terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Soekarno.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau studi pustaka, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pemilihan metode ini sejalan dengan pembahasan dalam jurnal yang dikaji, yang juga menggunakan pendekatan kualitatif historis melalui penelusuran literatur, arsip, dan kebijakan pendidikan Islam pada periode tersebut. Library research dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga memahami secara mendalam konsep, pemikiran, serta dinamika perkembangan pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang para ahli dan sejarawan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana proses terbentuknya kebijakan pendidikan Islam, seperti berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946, serta

⁴ Dari Masa and others, 'Jurnal Pendidikan Islam', 08 (2018), 228–42.

⁵ Kalpi Ningsih Heni, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama 1945-1965', *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1.1 (2015), 11

peran pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, metode studi pustaka memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji berbagai sumber baik klasik maupun kontemporer secara komprehensif. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi nilai-nilai, metode pembelajaran, serta pengaruh pendidikan Islam pada masa Orde Lama terhadap perkembangan pendidikan di masa selanjutnya. Karena penelitian ini berbasis teks dan bersifat konseptual analitis, maka tidak memerlukan observasi lapangan maupun wawancara langsung. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada kajian historis dan teoritis terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Soekarno.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan.

Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama.

Kedua, dilakukan penyajian data (data display) dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti kebijakan pemerintah, peran Kementerian Agama, kontribusi tokoh Islam, serta peran pesantren dan madrasah. Tahap ini penting agar data yang telah dikumpulkan lebih mudah dipahami dan dianalisis secara sistematis.

Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi dari berbagai literatur untuk menemukan konsep, gagasan, dan pemikiran yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini membantu peneliti dalam memahami secara mendalam bagaimana pendidikan Islam berkembang di tengah dinamika sosial dan politik pada masa tersebut. Dengan teknik analisis ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama serta relevansinya terhadap pendidikan Islam di masa sekarang.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Orde Lama

Periode Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966, yakni sejak masa kemerdekaan Indonesia sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno.⁶ Pada masa ini, sistem pemerintahan berpusat pada kekuasaan presiden yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara. Menurut Marlina, istilah Orde Lama digunakan oleh rezim Orde Baru untuk menyebut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.⁷

Dalam masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin.⁸ Awalnya, Soekarno menganut sistem demokrasi, namun kemudian mengembangkan konsep demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin

⁶ Lonie Anggita, 'Kebijakan Pendidikan Era Orde Lama Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam', 5 (2025), 4.

⁷ Titi Anjasari, 'Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru', 2 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>>.

⁸ Titi Anjasari, 'Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru', 2 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>>

dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem politik dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Sistem ini berpusat pada kekuasaan presiden dan berlandaskan pada prinsip gotong royong serta musyawarah mufakat dengan tujuan menciptakan stabilitas politik dan persatuan nasional.

Meskipun demikian, penerapan demokrasi terpimpin juga menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam isu-isu politik yang dianggap penting bagi negara. Dalam praktiknya, kekuasaan menjadi sangat terpusat pada presiden, sehingga peran lembaga-lembaga negara lainnya menjadi terbatas. Oleh karena itu, masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung hingga tahun 1966 dikenal sebagai masa Orde Lama, yang menjadi salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan politik dan pendidikan di Indonesia.

B. Landasan Hukum dan Kebijakan Pemerintahan Dalam Pendidikan Islam

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.⁹ Pada masa awal, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut salah satunya tercermin dari anjuran Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada 27 Desember 1945, yang menyatakan bahwa:

”Madrasah dan pesantren merupakan sarana pendidikan rakyat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian serta bantuan nyata dari pemerintah, baik berupa tuntunan maupun dukungan material.”

Anjuran ini menunjukkan bahwa madrasah dan pesantren memiliki posisi penting sebagai pusat pendidikan rakyat sebelum sistem pendidikan nasional terbentuk secara utuh. Pada saat itu, pelajaran agama Islam belum dapat dimasukkan secara langsung ke sekolah-sekolah formal, sehingga pesantren tetap berdiri sebagai lembaga mandiri yang berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya lembaga negara yang secara khusus menangani urusan keagamaan sebenarnya telah muncul pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, ketika Mr. Muhammad Yamin mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang mengatur masalah agama. Menurut Yamin, jaminan terhadap kepentingan agama tidak cukup hanya dilaksanakan melalui lembaga peradilan, tetapi memerlukan wadah kementerian yang dapat mengatur dan menjamin pelaksanaan pendidikan agama secara resmi. Meskipun usulan tersebut tidak disetujui dalam sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, perjuangan untuk menghadirkan lembaga keagamaan di tingkat pemerintah pusat terus berlanjut. Dukungan kuat muncul dari para tokoh Islam pada sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berlangsung pada 25-27 November 1945.¹⁰ Dalam sidang ini, usulan pembentukan kementerian khusus urusan agama diterima secara aklamasi.

Akhirnya, pada 3 Januari 1946, pemerintah secara resmi membentuk Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah No. 1/S.D.¹¹ Penunjukan H.M. Rasjidi sebagai Menteri

⁹ Titi Anjasari, 'Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru', 2 (2022), 144–55 <<https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>>

¹⁰ 'Sejarah'.

¹¹ Hasniyati and others.

Agama pertama menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kementerian Agama kemudian mengambil alih berbagai urusan keagamaan yang sebelumnya tersebar di beberapa kementerian, termasuk pengajaran agama di sekolah-sekolah, peradilan Islam, pencatatan pernikahan, serta penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan berdirinya Kementerian Agama, pendidikan Islam memperoleh dasar hukum, legitimasi, dan dukungan kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah. Hal ini menjadi awal dari proses integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap keberlangsungan pendidikan agama sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.

C. Perkembangan Awal dan Konsolidasi Kementrian Agama (1946-1956)

Setelah berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah penting untuk memperkuat kedudukan lembaga ini. Melalui Maklumat Menteri Agama tanggal 23 April 1946, ditetapkan bahwa urusan keagamaan seperti pengangkatan penghulu, pengawasan masjid, dan peradilan agama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pada masa ini, Kementerian Agama disebut sebagai “kementerian revolusi”, karena berperan aktif di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kantor pusatnya bahkan sempat berpindah ke Yogyakarta pada Maret 1946 dan menjalankan berbagai tugas dari sana.

Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, seluruh urusan keagamaan dari wilayah bekas negara bagian Republik Indonesia Serikat diserahkan secara resmi kepada Kementerian Agama. Dengan demikian, kementerian ini memiliki wewenang penuh atas urusan keagamaan di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949, Nomor 8 Tahun 1950, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951, yang memperjelas tugas dan fungsi Kementerian Agama.¹² Beberapa di antaranya adalah:

- Menegakkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Menyenggarakan dan mengawasi pendidikan agama di sekolah negeri.
- Membina madrasah serta perguruan agama.
- Mengatur pernikahan, perceraian, dan wakaf umat Islam.
- Serta memelihara dan memperbaiki tempat ibadah.

Pada peringatan 10 tahun berdirinya Kementerian Agama tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muchammad Iljas menegaskan kembali peran kementerian ini sebagai pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Peran Pesantren Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Dalam suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, pesantren tampil sebagai lembaga yang konsisten menjaga semangat keagamaan dan kebangsaan. Sejak masa sebelum kemerdekaan, pesantren telah dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam

¹² Pendidikan Islam, ‘Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa’, October 2019, 2023, hal. <<https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>>.

mencetak kader umat, kyai, dan santri pejuang bangsa. Setelah Indonesia merdeka, pesantren tetap melanjutkan perannya sebagai pusat pendidikan yang mencerdaskan umat dan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.

Pada masa Orde Lama, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga turut aktif dalam perjuangan sosial, politik, dan kebangsaan.¹³ Di tengah sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi pendidikan Islam, pesantren tetap bertahan sebagai wadah utama bagi tumbuhnya pendidikan Islam, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pelosok.¹⁴ Banyak tokoh besar pesantren yang berkontribusi dalam memperjuangkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang sekaligus tokoh utama pendiri Nahdlatul Ulama (NU).¹⁵ Beliau menanamkan pentingnya adab, etika, dan akhlakul karimah dalam membentuk generasi muslim yang berakarakter. Putranya, KH. Wahid Hasyim, juga berperan penting sebagai Menteri Agama dalam memperjuangkan agar pendidikan Islam diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional.

Tokoh lainnya, KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengusung pembaruan pendidikan Islam dengan mengintegrasikan pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah, sehingga melahirkan sistem pendidikan Islam yang lebih modern. Di Jawa Barat, KH. Zainal Mustafa dari Pesantren Sukamanah Tasikmalaya dikenal sebagai ulama pejuang yang menentang penjajahan dan membina masyarakat melalui pendidikan Islam. Sementara itu, pesantren besar lainnya seperti Lirboyo di Kediri dan Al-Khairiyah di Cilegon juga memiliki peran penting dalam mencetak kader ulama dan pendidik bangsa.

Di pesantren, pendidikan tidak terbatas pada pengajaran kitab kuning semata, tetapi juga melatih santri dalam kehidupan sosial, seperti kebersamaan, gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab. Semua santri diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, sehingga terbentuk karakter rendah hati dan menghargai sesama. Selain itu, pesantren mulai mengembangkan kurikulum yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama, sebagai langkah menuju sistem pendidikan Islam yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional Islam. Melalui kiprah para kyai dan lembaga pesantren, pendidikan Islam berhasil bertahan dan berkembang di tengah dinamika sosial dan politik masa Orde Lama. Pesantren menjadi benteng utama moral bangsa dan fondasi bagi lahirnya generasi muslim Indonesia yang cerdas, berakhlak, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.¹⁶

E. Tantangan dan Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, ketika teknologi belum berkembang seperti saat ini, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Setiap periode tentu memiliki rintangannya sendiri, dan masa ini ditandai dengan kesulitan dalam hal kebijakan pemerintah, kondisi sosial-politik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun pada waktu itu telah berdiri Kementerian Agama dan beberapa peraturan yang mengatur pengajaran

¹³ Pendidikan Islam, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', October 2019, 2023,hal.87 <<https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>>.

¹⁴ Pendidikan Islam, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', October 2019, 2023,hal. <<https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>>.

¹⁵ Titi Anjasari, 'Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru', 2 (2022), 146–55 <<https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>>

¹⁶ Muhammad Hasan Baidlawie, 'Perkembangan Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama (Kajian Kebijakan Pendidikan Agama Islam Tahun 1945-1966),2018.

agama di sekolah-sekolah, namun pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal. Masih banyak sekolah formal yang belum memiliki tenaga pendidik agama, bahkan sebagian masyarakat memandang bahwa pendidikan agama kurang penting dibandingkan dengan pelajaran umum.

Selain itu, pada masa demokrasi terpimpin, perhatian pemerintah lebih terfokus pada urusan politik dan pembangunan ekonomi. Akibatnya, bidang pendidikan terutama pendidikan Islam belum dijadikan prioritas utama dalam kebijakan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyak madrasah dan pesantren tetap bertahan secara mandiri, tanpa mendapatkan dukungan penuh dari negara baik dalam hal pendanaan, fasilitas, maupun regulasi yang memadai.¹⁷ Di sisi lain, dinamika sosial dan politik pada masa itu juga turut memengaruhi arah perkembangan pendidikan Islam. Munculnya berbagai ideologi dan aliran politik menimbulkan perbedaan pandangan mengenai posisi agama dalam kehidupan bernegara. Dalam situasi ini, pendidikan Islam harus berjuang keras agar tidak tersisih dari sistem pendidikan nasional yang sedang dibentuk.

Namun demikian, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, para tokoh Islam dan lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah tetap menunjukkan keteguhan dan semangat berjuang. Mereka terus berupaya mengembangkan metode pembelajaran yang relevan, memperkuat kelembagaan, serta memperjuangkan agar pendidikan agama mendapat tempat yang layak di sekolah-sekolah formal.¹⁸ Upaya gigih ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam di masa-masa berikutnya, sekaligus bukti bahwa pendidikan Islam mampu bertahan di tengah dinamika sosial-politik bangsa.

F. Dampak dan Capaian Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Masa Orde Lama (1945–1966) menjadi periode penting bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mulai menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan pendidikan Islam melalui pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, yang menjadi tonggak awal pengaturan pendidikan agama secara resmi oleh negara. Keputusan ini diperkuat oleh anjuran Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada 27 Desember 1945 yang menegaskan bahwa madrasah dan pesantren merupakan sumber pendidikan rakyat yang sudah berakar kuat di masyarakat, sehingga layak mendapatkan perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah dalam bentuk tuntunan maupun bantuan material.¹⁹ Kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa.

Dukungan pemerintah juga terlihat dalam berbagai kebijakan yang mengatur pengajaran agama di sekolah formal serta usaha awal integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini memberikan dampak positif berupa semakin kuatnya legalitas pendidikan Islam dan meningkatnya posisi pesantren serta madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya tetap bertahan sebagai pusat pengajaran agama, tetapi juga menjadi tempat pembinaan moral, sosial, dan perjuangan kebangsaan. Para tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zainal Mustafa, dan H.M. Rasjidi turut memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan pengakuan dan penguatan pendidikan Islam pada

¹⁷ Pendidikan Islam, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', October 2019, 2023, hal.262 <<https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>>

¹⁸ 'Muhammad Aminudin, Pebrida Waty Saragih PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MASA ORDE LAMA TAHUN 1945-1966.

¹⁹ Anggita, hal.9.

tingkat nasional.²⁰ Melalui perjuangan mereka, pendidikan Islam memperoleh ruang untuk berkembang meskipun situasi politik dan ekonomi negara belum stabil.

Dari perspektif historis, pemerintah menerapkan politik konvergensi dengan tujuan menghilangkan dualisme pendidikan warisan kolonial yang memisahkan sekolah umum dari pendidikan Islam tradisional. Untuk itu, madrasah dianjurkan memasukkan pelajaran umum dalam kurikulumnya, sementara sekolah umum diharapkan mengajarkan pelajaran agama Islam secara lebih baik.²¹ Proses integrasi ini memberi dampak besar bagi madrasah dan pesantren, karena mendorong lahirnya sistem pendidikan Islam yang lebih modern. Banyak pesantren kemudian mendirikan madrasah dengan pembelajaran klasikal, kurikulum tetap, dan penambahan pelajaran umum. Kebijakan ini memiliki efek jangka panjang, terbukti hingga kini hampir seluruh pesantren di Indonesia memiliki madrasah formal yang mengikuti ketentuan pemerintah. Namun, kebijakan pemerintah Orde Lama tidak sepenuhnya memberikan hasil positif.

Namun, kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama juga melahirkan sejumlah dampak negatif yang memengaruhi laju perkembangan pendidikan Islam. Pengakuan hukum terhadap madrasah masih lemah karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tidak secara tegas menempatkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kondisi ini membuat madrasah berada pada posisi yang kurang kuat dibanding sekolah umum terutama dalam hal pendanaan, fasilitas, dan dukungan struktural. Program integrasi kurikulum antara madrasah dan sekolah umum pun tidak berjalan seimbang. Madrasah diwajibkan memasukkan pelajaran umum, tetapi kesulitan dalam pemenuhannya karena keterbatasan guru dan sarana. Di sisi lain, sekolah umum mengajarkan pelajaran agama hanya secara formalitas sehingga kualitasnya tidak setara dengan pendidikan agama di madrasah. Ketidakseimbangan ini semakin mempertegas dualisme pendidikan di Indonesia.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan besar. Banyak madrasah masih bergantung pada swadaya masyarakat, sementara bantuan pemerintah sering tidak merata dan berubah-ubah mengikuti dinamika politik. Menjelang akhir masa Orde Lama, instabilitas politik dan fokus pemerintah pada isu ekonomi mengakibatkan rendahnya perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam secara menyeluruh. Selain itu, dorongan pemerintah agar madrasah menyesuaikan diri dengan struktur administrasi sekolah umum menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi pendidikan Islam. Dalam beberapa kasus, madrasah kurang mampu mempertahankan karakter khasnya karena lebih banyak berfokus pada penyesuaian administratif dibanding penguatan nilai dan tradisi keislaman.

Secara keseluruhan, masa Orde Lama membawa dampak yang bersifat dualistik bagi pendidikan Islam.²² Di satu sisi, fondasi kuat berhasil dibangun melalui dukungan awal pemerintah dan peran besar pesantren serta tokoh-tokoh agama. Namun di sisi lain, berbagai kendala struktural dan kebijakan yang belum optimal membuat perkembangan pendidikan Islam berjalan tidak merata. Meski demikian, periode ini tetap menjadi pijakan penting bagi

²⁰ Sismawati Sismawati and others, 'Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Berbagai Pihak Tanpa Menonjolkan Dikotomi Umum Dan Agama', 2.5, hal.309 (2024).

²¹ Kebijakan Pendidikan and others, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN ORDE LAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSISTENSI MADRASAH', 5.2 (2019), 24.

²² Pendidikan and others.

pembentukan sistem pendidikan Islam modern di Indonesia dan menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut pada masa berikutnya.

Kesimpulan

Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama (1945–1966) merupakan salah satu periode penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana, kebijakan pemerintah yang belum optimal, serta kondisi sosial politik yang tidak stabil, pendidikan Islam tetap mampu bertahan dan terus berkembang berkat peran besar para ulama, lembaga pesantren, dan dukungan awal dari pemerintah. Pada masa inilah terbentuk fondasi yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam di periode-periode selanjutnya. Melalui Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. Tahun 1946, pendidikan Islam mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Kebijakan ini memperkuat kedudukan pendidikan Islam, meskipun penerapannya pada saat itu masih terbatas dan belum merata.

Selain dukungan dari pemerintah, lembaga pesantren dan madrasah menjadi pilar utama dalam mempertahankan eksistensi pendidikan Islam. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, sosial, dan perjuangan bangsa. Para kyai dan santri berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh besar seperti KH. Hasyim Asy'ari dengan Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, KH. Zainal Mustafa dengan Pesantren Sukamanah, serta H.M. Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama, memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan pengakuan dan penguatan pendidikan Islam di Indonesia.

Meskipun perhatian pemerintah pada masa itu lebih terfokus pada politik dan ekonomi, serta sarana pendidikan masih terbatas, pendidikan Islam tetap berkembang secara mandiri. Pesantren dan madrasah menjadi tempat lahirnya para ulama dan tokoh bangsa yang berilmu, berakhlak, serta memiliki semangat kebangsaan. Upaya untuk memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum mulai muncul pada periode ini, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sistem pendidikan Islam modern yang terpadu dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, masa Orde Lama menjadi fase penting yang menegaskan eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Melalui perjuangan para tokoh, peran lembaga pesantren, serta dukungan pemerintah, pendidikan Islam berhasil meletakkan dasar kuat bagi terbentuknya karakter bangsa yang religius, berakhlak, dan berjiwa nasionalis. Fondasi inilah yang kemudian menjadi pijakan utama bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya dan menjadikannya bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggita, Lonie, 'Kebijakan Pendidikan Era Orde Lama Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam', 5 (2025), 4436–48
- Anjasari, Titi, 'Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru', 2 (2022), 141–55 <<https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>>
- Muhammad Hasan Baidlawie, 'Perkembangan Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama (Kajian Kebijakan Pendidikan Agama Islam Tahun 1945-1966)', 2018.
- Hasniyati, St, Gani Ali, Fakultas Tarbiyah, and Keguruan lain, 'KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM St. Hasniyati Gani Ali', 8.2 (2015), 99–110
- Heni, Kalpi Ningsih, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama 1945-1965', *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1.1 (2015), 1–15
- Islam, Pendidikan, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', October 2019, 2023 <<https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>>
- Ade Suhendra Darul ' Ilmi Vol . 08 No . 01 Juni 2020 Posisi Madsarah Dan Pesantren 79–94
- Masa, Dari, Kolonial Hingga, Orde Baru, Moch Khafidz, and Fuad Raya, 'Jurnal Pendidikan Islam', 08 (2018), 228–42
- 'Muhammad Aminudin, Pebrida Waty Saragih PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MASA ORDE LAMA TAHUN 1945-1966.
- Pendidikan, Kebijakan, Orde Lama, Dan Dampaknya, and Terhadap Eksistensi, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN ORDE LAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSISTENSI MADRASAH 5.2 (2019), 1–30
- 'Sejarah'
- Sismawati, Sismawati, Muhammad Taraki, Kasful Anwar Us, Alamat Jl, Arif Rahman, Hakim No, and others, 'Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Berbagai Pihak Tanpa Menonjolkan Dikotomi Umum Dan Agama', 2.5 (2024)